

## BAB II

### DINAMIKA UMUM NEGARA MYANMAR

Negara Myanmar merupakan sebuah negara yang berada di wilayah Asia Tenggara, dimana secara geografis Myanmar menjadi salah satu anggota dari *Association of South East Nation (ASEAN)*. Sebuah asosiasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang terbentuk pada 8 Agustus 1967.

#### A. Sistem Pemerintahan dan Politik Myanmar

Pemilu pertama Myanmar diadakan pada tahun 1947, sebagian besar kursi anggota parlemen diduduki oleh para anggota Liga Rakyat Merdeka Anti Fasi (AFPFL), yang dipimpin oleh Aung San, yang juga merupakan ayah dari tokoh Aung San Suu Kyi. Akan tetapi hal ini tidak berlangsung lama, karena Aung San dibunuh oleh musuh politiknya. Aung San sebagai pemimpin Liga Rakyat Merdeka Anti Fasi (AFPFL), akhirnya digantikan oleh U Nu, yang kemudian terpilih sebagai Perdana Menteri pertama Myanmar.

Di bawah pemerintahan sipil U Nu, ia mencoba untuk menjalankan sebuah pemerintahan yang Demokratis, dengan menggunakan sistem parlementer. U Nu dihadapkan pada situasi yang sangat sulit, selayaknya sebuah negara yang baru merdeka, berbagai permasalahan sosio politik yang sangat pelik menunggu untuk

diselesaikan. Dengan menggunakan strategi pembangunan *Pydawtha* (negara yang makmur), U Nu berusaha dengan sangat keras dalam menyelesaikan berbagai persoalan dalam negerinya. Akan tetapi sayangnya, strategi tersebut pada akhirnya gagal mengatasi berbagai persoalan kompleks yang muncul, baik yang berhubungan dengan aspek perekonomian, pembelotan, maupun pemberontakan (Steinberg, 1982 : 45).

Campur tangan militer mulai nampak saat Jendral Ne Win, ditugaskan untuk mengendalikan ketertiban dalam mempersiapkan pemilu tahun 1960. Pemerintahan militer saat itu Pemerintahan militer, pada saat itu, berhasil menjalankan tugasnya untuk memulihkan keadaan dalam negeri sampai dengan terselenggaranya pemilu tahun 1960 yang dimenangkan oleh U Nu dan partainya, *Union Party*. Pihak militer kemudian memberikan ultimatum kepada pemerintah sipil, dengan memberikan waktu selama 2 tahun untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Myanmar. Akan tetapi, pemerintah sipil mengalami kegagalan dalam menata kembali kondisi internal negeri Myanmar.

Hal ini semakin diperparah dengan kegagalan U Nu dalam memperbaiki sistem perekonomian dan administrasi Myanmar, sehingga menyebabkan banyak ketidakpuasan yang muncul di kalangan pro-militer dan militer. Sehingga pada 2 Maret 1962 pihak militer melakukan kudeta dengan dipimpin oleh Jendral Ne Win. Bisa dikatakan, dengan adanya kudeta tersebut merupakan awal dari kekuasaan Junta Militer yang menggantikan pemerintahan yang demokratis di Myanmar.

Ne Win berkuasa selama 1962 – 1988, dengan hanya ada satu partai politik yang memegang kekuasaan, yaitu *Burmesse Socialist Program Party* (BSPP) yang tentu saja dibentuknya sendiri dan keanggotaannya didominasi oleh kalangan militer. *Burmesse Socialist Program Party* (BSPP) atau yang lebih dikenal dengan partai Lenzin ini, merupakan partai tunggal yang dilaksanakan untuk mendukung program sosialis dengan mayoritas anggota berasal dari golongan militer. Sejak berdiri tahun 1962, partai ini baru kemudian disahkan pada tahun 1964 keanggotaan partai ini didominasi oleh militer. Pada tahun 1972 militer menjadi pilar pokok dari partai (Taylor, 1980 : 40).

Pada masa Ne Win ini, ia mendirikan pemerintahan otoriter dan memerintah dengan gaya diktator (Steinberg, 1982: 33-35). Rakyat tidak memiliki hak pilih untuk menentukan pemimpinnya sendiri, karena keputusan politik harus melalui pimpinan militer di Rangoon. *Partai Lenzin* pimpinan jenderal Ne Win, menjadi satu-satunya partai resmi yang berdiri. Oposisi datang dari penjuru perkotaan dan pedalaman, tetapi selalu gagal karena pihak oposisi tidak memiliki pemimpin kharismatik dan lemahnya masyarakat sipil Myanmar.

Pemimpin berikutnya adalah Jenderal Saw Maung yang resmi menjabat pada 18 September 1988 setelah melakukan kudeta. Namun hal ini tak banyak memberikan perubahan, karena pemimpin yang baru masih menganut sikap otoriter. Hal ini hanya pergantian pemerintahan militer yang lama ke pemerintahan militer yang baru, partai yang semula berkuasa, *Burmesse Socialist Program Party* (BSPP) atau yang lebih dikenal dengan partai Lenzin ini, menjadi *State of Law and Order Restoration*



fungsi-fungsi lembaga-lembaga sebelumnya, dimana *The State Peace Development Council* (SPDC) mengontrol kehidupan sosial politik rakyat Myanmar.

Junta militer sangat mengatur dan membatasi kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya rakyat Myanmar. Pemerintah tak segan-segan mengambil tindakan yang kejam demi menumpas berbagai gerakan perlawanan yang prodemokrasi. Seperti yang terjadi pada beberapa waktu lalu, Junta tak segan-segan membasmi aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh para biksu, yang menimbulkan jumlah korban yang sangat banyak, serta mendapat sorotan dunia.

Begitu kuatnya peran militer sehingga David I. Steinberg menempatkan Myanmar sebagai *.The most monolithically military-controlled in the world.* (Neher, 1995:121)

Kekuasaan etnis Burma yang sewenang-wenang memunculkan berbagai perlawanan dari etnis - etnis minoritas. Alan Collins seperti dikutip Dr Bambang Cipto, Ma dalam bukunya yang berjudul "Hubungan Internasional di Asia Tenggara" pada halaman 159 menyebutkan bahwa, Suku Karen misalnya, membentuk Karen National Union (KNU) pada tahun 1947. Sayap militer KNU adalah Karen National Liberation Army (KNLA). Tahun 1976 beberapa kelompok minoritas bergabung dalam sebuah persekutuan militer, NDF (National Democratic Front) yang bertujuan untuk membela diri dari tekanan militer pasukan pemerintah Burma.

Paska penindasan pada tahun 1988 muncul kelompok oposisi baru yang merupakan gabungan dari kelompok-kelompok etnis dan kelompok lain yang tidak

Liga Demokrasi Nasional (NLD) pimpinan Aung SAN Suu Kyi dalam pemilihan tahun 1990.

Tidak berhenti sampai disitu, pemerintah junta kemudian melakukan penangkapan terhadap peraih Nobel Perdamaian tahun 1991 tersebut, bersama aktifis demokrasi lainnya. Aung San Suu Kyi dianggap sebagai musuh utama pemerintah, yang dapat membahayakan kesatuan dan kedaulatan Myanmar.

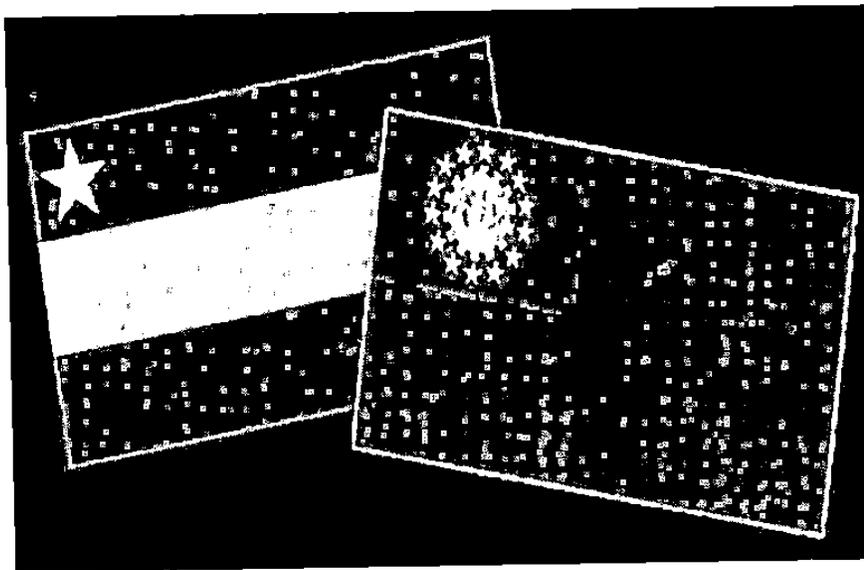
Aung San Suu Kyi adalah anak dari tokoh pejuang kemerdekaan Myanmar, Jenderal Aung San. Aung San Suu Kyi tinggal dan besar di negara lain, yaitu Inggris, sehingga pola pemikirannya terbentuk dengan mengikuti pola pemikiran di negara-negara barat, terutama mengenai sistem demokrasi yang dianut oleh negara barat. Hal inilah yang membuat pemerintahan Junta Militer menjadi khawatir, dimana kemudian Aung San Suu Kyi dianggap dapat menjadi ancaman serius untuk keeksisan pemerintahan Junta Militer.

Para elit beranggapan bahwa potensi ancaman lain, adalah Negara tetangga. Cina merupakan sebuah negara besar yang menjadi sekutu terdekat SLORC, dimana hubungan politik kedua negara semakin menunjukkan adanya peningkatan, hal ini sama halnya dengan hubungan antara Myanmar dan India. Dalam hal ini, Cina, India maupun Bangladesh tidak termasuk dalam daftar negara tetangga yang dipandang dapat menjadi ancaman Myanmar selanjutnya ini.

## B. Berbagai Perubahan Identitas Myanmar

Pemerintah Junta Militer Myanmar mengganti bendera nasional, lagu kebangsaan, dan nama resmi Myanmar. Perubahan itu diuraikan di konstitusi baru yang dipublikasikan pada 2008, namun pemerintah tidak mengumumkan tanggal pengenalannya.

Nama resmi baru negara itu adalah *'Republic of the Union of Myanmar'* yang sebelumnya *'Union of Myanmar'*. Pihak militer yang telah memerintah sejak kudeta 1962, mengubah nama negara itu menjadi bahasa Inggris dari Burma menjadi Myanmar pada 1989, setahun setelah berkembangnya protes atas pemerintahan militer dan setahun sebelum pemilu terakhir.



Bendera baru memiliki pita horizontal berwarna kuning di bagian atas, hijau tua di tengah, dan merah di bawah dengan bintang putih berada di tengah-

perlambang dari bintang. Tidak ada penjelasan mengapa ada perubahan yang termasuk cap negara yang baru.<sup>19</sup>

### C. Politik Dalam Negeri Myanmar

Samuel P. Huntington, dalam bukunya *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century* (1991) mencatat tahun 1974 hingga 1990-an sebagai gelombang ketiga demokrasi dunia. Huntington melihat peristiwa kudeta oleh sekelompok perwira muda dalam gerakan *Movimento das Forças Armadas* (MFA) di Portugal yang berhasil menggulingkan diktator Marcello Caetano sebagai awal periode gerakan ke arah demokrasi diseluruh dunia yang kemudian dikenal sebagai gelombang ketiga demokratisasi dunia (Huntington, 1991: 4).

Gerakan menuju demokratisasi di Portugal tahun 1974 tersebut kemudian juga diikuti oleh serangkaian gerakan demokrasi di berbagai belahan dunia. Selama 15 tahun berikutnya, gelombang demokratisasi ini berlingkup global di mana sekitar 30 negara telah bergeser dari otoriterisme menjadi demokrasi dan sekurangnya 20 negara lain telah dipengaruhi oleh gelombang demokratisasi ini. Kasus Korea Selatan, Thailand, Philipina, dan bahkan Indonesia dapat dijadikan contoh bagaimana tumbangannya rezim otoriter di belahan dunia ketiga.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup><http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/10/10/26/142401-myanmar-ganti-bendera-nama-resmi-lagu-kebangsaan>, yang diakses pada hari Rabu, 7 September 2011

<sup>20</sup> Jurnal Universitas Paramedina, Vol. 2 No. 2, Januari 2003: 128-141

### C.1. Penyebab Terjadinya Gelombang Protes

Sikap optimisme yang cukup besar menyebar pada berbagai kalangan pengamat politik internasional mengenai cerah prospek demokratisasi di dunia. Akan tetapi nampaknya, sikap optimisme terhadap masa depan demokratisasi di dunia ini pada kenyataannya tidak berjalan dengan tanpa kendala, dan malah dapat berubah menjadi sikap pesimis, saat diketahui fakta akan adanya beberapa negara yang mengalami kegagalan demokrasi, khususnya yang dilakukan oleh kelompok militer. Salah satu dari negara tersebut adalah Myanmar yang dikaji secara mendalam dalam tulisan ini. Sebagai negara yang masih dikuasai rezim militer, bukan berarti tidak ada gerakan demokrasi di negara ini.

Etnis mayoritas di Myanmar, etnis Burma, merupakan kelompok pendatang yang berasal dari Tibet. Kelompok ini datang belakangan, dimana sebelumnya etnis Shan (Siam dalam bahasa Thai) telah terlebih dahulu mendiami Myanmar. Etnis Shan pada umumnya menghuni wilayah di sepanjang perbatasan Thailand-Myanmar. Sebelum etnis Burma datang, selain etnis Shan, sudah ada etnis Mon, yang menghuni wilayah selatan, juga dekat perbatasan dengan Thailand.

Untuk berkuasa, selayaknya ditempat lain, meletuslah perang yang terjadi antara tiga etnis utama di Myanmar ini. Inilah yang terjadi, perebutan kekuasaan, sebelum kedatangan Inggris pada tahun 1885

Ada juga etnis lain di Myanmar, yang kemudian turut meramalkan ketegangan politik sebelum penjajahan dan pasca-penjajahan Inggris. Misalnya, ada etnis Rakhine, yang lebih dekat ke Bangladesh.

Saat penjajahan, berbagai kelompok etnis ini berjuang untuk mengakhiri penjajahan. Setelah penjajahan berakhir dan merdeka pada tanggal 4 Januari 1948, makin terjadi kontak lebih ramah antara etnis Burma dan semua etnis non-Burma.

Aung Sandan U Nu adalah tokoh utama di balik kemerdekaan dan menjadi pemimpin negara. Namun tahun 1962, militer yang didominasi etnis Burma mengambil alih kekuasaan negara, dengan didalangi oleh Ne Win. Cikal bakal junta militer sekarang (disebut sebagai Dewan Negara untuk Perdamaian dan Pembangunan / SPDC) berasal dari kekuasaan Ne Win itu. SPDC sendiri didominasi oleh etnis Burma. Konfigurasi kekuasaan hak pun menjadi tidak berimbang antara etnis Burma yang mendominasi dan etnis non-Burma yang merasa ditindas. Sehingga muncullah perlawanan dari beberapa etnis non-Burma, termasuk etnis Karen, yang mendominasi wilayah pegunungan di utara, yang dikenal sebagai golden triangle (segitiga emas).

Berbagai cara telah ditempuh oleh Etnis Burma untuk mencegah hal itu terjadi. Sejak tahun 1960-an, terjadilah diaspora warga Myanmar. Berbagai warga Myanmar dari kelompok etnis kini tinggal di negara-negara yang

Pada pelaksanaan pemilu tahun 1990, Pihak demonstrasi pimpinan Aung San Suu Kyi meraih suara mayoritas sehingga kemenangan jatuh pada Pihak ini. Kemenangan ini tentulah ditentang oleh kelompok etnis Burma. Pihak Aung San Suu Kyi dan etnis non-Burma lainnya merupakan ancaman bagi supremasi etnis Burma. Kemenangan Suu Kyi pun dilawan habis-habisan. Kekuasaan direbut. Hal inilah yang terjadi seterusnya.<sup>21</sup>

### C.2. Gelombang Protes tahun 1988

Myanmar justru memiliki sejarah protes massa yang panjang walaupun pemerintahan Junta terkenal akan pelanggaran HAM. Gelombang protes Myanmar menguat sejak dimulainya masa pemerintahan militer Jenderal Ne Win. Pada tahun 1988, gelombang protes massa Myanmar ini melibatkan pelajar, pejabat sipil, pekerja sampai dengan para biksu Budha. Ketika penggunaan tentara bersenjata demi kudeta militer dilakukan, berbagai protes dan kecaman datang dari berbagai kalangan.

Sejak awal massa Myanmar memang telah menginginkan berakhirnya junta militer ini. The State Peace and Development Council's (SPDC's) Myanmar mengajukan tuntutan yang populer untuk mereformasi pemerintahan menjadi neo-liberal. Tuntutan reformasi ini terutama berlaku untuk ekonomi, termasuk saat pemerintah Myanmar menarik subsidi BBM.

---

<sup>21</sup> “ Myanmar 1988-1990: A History of the Burmese Revolution, London: Zed Books, 1991, hal. 7.

Protes massa Myanmar memang tak segaduh Amerika yang liberal. Dimana-mana rezim militer masih memegang kendali sosial. Asia Times mencatat, gerakan protes umumnya mulai dalam jumlah kecil dan tersebar. Beberapa bulan terakhir ini misalnya, protes kecil dan damai terus berkelanjutan di ibukota Yangon.

Namun kemarahan publik ini bisa berubah menjadi efek bola salju dan menjadi gerakan massa besar-besaran. Salah satunya yang terjadi di Pakkoku. Setelah bola salju ini pecah, maka perlahan akan kembali menggumpal. Beberapa hari setelah kejadian Pakkoku, 500 biksu kembali berbaris damai di Yangon, Myanmar. Layaknya biksu, New York Times mencatat gerakan ini malah berdoa untuk kedamaian dan keselamatan setelah peristiwa Pakkoku.

Gerakan dalam protes bukan hanya terjadi dari satu pihak saja. Pemerintah Myanmar juga menyikapinya dengan Union Solidarity and Development Association (USDA). USDA tercatat kerap bergabung dalam gelombang protes ini. Organisasi propemerintah ini tercatat bahkan ikut terlibat dalam upaya pembunuhan Suu Kyi di tahun 2003. Meski gagal, aksi tersebut memakan korban simpatisan National League for Democracy (NLD) sebagai gantinya.

USDA berfungsi menyaingi kelompok pelajar dan biksu Buddha yang vokal dalam aksi protes. Apalagi secara khusus aktivis Myanmar telah memiliki organisasi protes massanya sendiri. Organisasi 88 Generation Student ini didirikan oleh penyuair internasional asal Myanmar Ming Ko Naing

dan Ko Ko Gyi. Keduanya mendirikan organisasi ini setelah dibebaskan dari 14 tahun penjara, dan cukup populer di mata masyarakat Myanmar. Meski berlabel pelajar, Generation 88 kerap bekerjasama dengan para pekerja, sipil hingga para biksu Buddha.<sup>22</sup>

### C.3. Gelombang Protes tahun 2007

Bisa dikatakan, protes dimotori oleh para biksu budha di Myanmar. Awalnya adalah adanya aksi dari para biksu dalam menolak berbagai sumbangan makanan dari para jendral penguasa dan keluarganya. Hal ini menjadi suatu pertanda bahwa para biksu tidak lagi mau merestui kelakuan para penguasa militer Myanmar. Demo yang melibatkan ribuan biksu ini menjalar ke berbagai kota di Myanmar, warga sipil pun pada akhirnya juga banyak yang mengikuti. Junta Militer memakai aksi kekerasan dalam membubarkan demo-demo besar ini, Pagoda-pagoda disegel, para demonstran ditahan, dan senjata digunakan untuk membubarkan massa. Banyak biksu ditahan, beberapa diyakini disiksa dan meninggal dunia.

Sepanjang Gelombang protes terjadi belasan orang diyakini menjadi korban, termasuk seorang reporter berkebangsaan Jepang, Kenji Nagai, yang ditembak oleh tentara dari jarak dekat saat meliput demonstrasi. Kematian warga Jepang ini memicu protes Jepang pada Myanmar dan mengakibatkan

<sup>22</sup><http://www.geografiasean110mb.com/MYANMAR.html>, yang diakses pada hari Jumat, 7

dicabutnya beberapa bantuan Jepang kepada Myanmar. Selain itu kenaikan harga BBM yang mencapai 500 persen menjadi salah satu alasan terjadinya demo besar-besaran ini.

Di Myanmar, setelah pemberontakan yang dipimpin biksu gagal pada tahun 2007 ini, warga ditengarai menggunakan internet untuk membocorkan informasi dan rekaman video real time ke dunia luas. Sejak itulah, rezim memblokir akses internet di Myanmar. Kini, akses internet telah dibuka kembali.<sup>23</sup>

#### **D. Politik Luar Negeri Myanmar**

Tin Maung Maung Than seperti dikutip Dr Bambang Cipto, Ma dalam bukunya yang berjudul “Hubungan Internasional di Asia Tenggara” pada halaman 158, menyebutkan bahwa, Konsepsi dan Implementasi politik luar negeri Myanmar didominasi junta militer sejak tahun 1988. Kelompok elit politik dan militer tingkat tinggi yang dikenal sebagai *State Law Order Restoration Council* (SLORC), mendominasi pengembangan wacana tentang politik luar negeri dan keamanan nasional dan tidak memberikan ruang bagi kelompok di luar elit untuk berpartisipasi dalam urusan keamanan nasional.

Masih bersumber dari literatur yang sama, Politik luar negeri Myanmar saat ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu :

---

<sup>23</sup><http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/11/09/29/lisa9dv-suu-kyi-myanmar->

1. Sejarah negara yang awalnya menyandang nama Burma ini dipenuhi dengan berbagai peperangan yang berlangsung hampir secara terus menerus. Proses pembentukan Myanmar secara tradisional berlangsung di tengah peperangan antar kelompok. Disamping itu, pada masa lalu Myanmar juga berhadapan dengan invasi dari luar yang dilakukan oleh pasukan-pasukan yang berasal dari Mongol, Cina dan Inggris.
2. Pada era modern, Myanmar berhadapan dengan kekuatan imperialis Jepang dan nyaris tak pernah luput dari perang saudara, hal inilah yang kemudian mengakibatkan konsepsi keamanan nasional dipenuhi dengan upaya mempertahankan kesatuan nasional dari dalam dan luar negeri.
3. Geografi, dimana Myanmar merupakan sebuah negara yang dikelilingi oleh lima negara, dimana dua diantara negara tersebut merupakan negara - negara raksasa, yaitu India dan China.
4. Keberagaman etnis, budaya dan agama. Etnis Bamar merupakan etnis dominan yang berjumlah sekitar 69% dari keseluruhan penduduk Myanmar, sedangkan etnis-etnis minoritas misalkan Karen, Shan, Araknese, Kachin, Chin dan Mon. Faktor terakhir ini yang sangat menyedot energi politik dan ekonomi pemerintah pusat, hal ini disebabkan oleh etnis Burma, yang mendominasi pemerintahan, yang melakukan tindakan Burmaisasi pada kelompok etnis lainnya merupakan sumber utama konflik dan instabilitas domestik

## **E. Hubungan Luar Negeri Myanmar**

Rezim militer Myanmar tidak mempunyai sikap ketergantungan dalam hal ekonomi, militer, dan logistik terhadap negara lain. Hal ini sangat jelas terlihat dalam kasus berikut ini. Seperti diketahui segera setelah SLORC menolak peralihan kekuasaan kepada NLD pada tahun 1990, tekanan dunia internasional terhadap Myanmar semakin meningkat. Seperti contohnya saja Masyarakat Eropa dan kongres Amerika Serikat yang dengan segera membuat sanksi-sanksi ekonomi dan militer terhadap Myanmar. Namun karena tidak adanya ketergantungan ekonomi, militer, dan logistik terhadap negara-negara tersebut maka tekanan-tekanan dunia internasional tidak mampu melemahkan posisi rezim militer yang berkuasa.<sup>24</sup>

Berikut ini adalah hubungan Myanmar dengan negara-negara tetangganya, dan dalam forum negara-negara se-Asia Tenggara (ASEAN).

### **E.1. Hubungan Myanmar dengan Negara-Negara Tetangga**

Myanmar memiliki jalinan yang sangat kuat dengan China dan India. Para pejabat militer yang menguasai pemerintahan pernah berkiblat pada sistem pemerintahan ala China, pada saat Mao Tse Tung memimpin pemerintahan komunis di China. Hal ini lah yang membuat hubungan Cina dan Myanmar terjalin erat hingga kini. Walaupun demikian, kemajuan ekonomi China, tidak memberi dampak positif terhadap perekonomian

<sup>24</sup> Jurnal Universitas Paramedina, Vol. 2 No. 2, Januari 2002: 138-141

Myanmar yang kini sedang kritis.<sup>25</sup> Hubungan Myanmar dengan India dimulai sejak Myanmar pernah disatukan dengan India pada masa penjajahan Inggris, dimana hal ini bertujuan untuk mempermudah Inggris dalam mengontrol daerah jajahannya. India lah yang secara tak langsung menularkan rasa nasionalisme yang tinggi pada Myanmar. Junta militer yang menguasai Myanmar sejak tahun 1962, pernah mengadopsi Sistem Ekonomi Campuran antara Sosialisme dan Kapitalisme.

## **E.2. Hubungan Myanmar dalam Forum ASEAN**

Bagi negara-negara Asean, Myanmar adalah bagian dari rencana besar untuk memperkuat organisasi regional yang sedang bertumbuh. Oleh karena itu, sekalipun Myanmar dikuasai junta militer yang represif ASEAN tetap mengusahakan cara-cara damai dalam menghadapi konflik internal Myanmar.

Dalam menangani krisis Myanmar, ASEAN tetap mengedepankan prinsip tidak mencampuri urusan negara lain, sikap yang sama dengan yang diterapkan terhadap rejim Pol Pot sebelumnya. Asean kemudian mengembangkan pendekatan '*constructive engagement*', yang merupakan upaya untuk membantu menyelesaikan persoalan internal Myanmar dengan cara-cara Asia Tenggara, dengan tanpa harus menggunakan kekerasan. Bagi negara anggota ASEAN, Pendekatan ini cukup disukai karena hal ini dinilai dapat mencegah campur tangan pihak asing, khususnya campur tangan dari

negara-negara besar. Akan tetapi, pendekatan ini mendapat kecaman dan cibiran dari negara-negara besar yang memiliki kepentingan tertentu dan menginginkan ASEAN untuk mengambil langkah mengisolir Myanmar agar mau mengubah memperbaiki keadaan politiknya.<sup>26</sup>

### **E.3. Hubungan Myanmar dengan PBB**

Myanmar bergabung dengan PBB tepatnya pada 19 April 1948. Pada tahun 2007 Myanmar pernah mendapat peringatan keras dari Dewan Keamanan (DK) PBB, dikarenakan pemerintah junta melakukan penindasan dan penumpasan keji terhadap aksi unjuk rasa damai. PBB juga menyerukan junta militer untuk melakukan pembebasan terhadap para tahanan politik serta seruan agar rezim itu bersedia untuk melakukan dialog dengan para tokoh pro-demokrasi yang ditahan, terutama Aung San Suu Kyi, demi terciptanya perdamaian nasional, dalam pernyataan tersebut.<sup>27</sup>

Munculnya fakta yang membuktikan bahwa Myanmar menjalin hubungan sembunyi-sembunyi dengan Korea Utara dalam hal perdagangan senjata dan pelatihan militer sempat membuat heboh dunia internasional. Hal ini terungkap setelah adanya kunjungan Sekretaris Jendral PBB, Ban Ki Moon ke Myanmar pada tahun 2009, meskipun tujuan utama Ban Ki Moon

---

<sup>26</sup> Bambang Cipto, Hubungan Internasional di Asia Tenggara : Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2007. Hal 70 - 71

<sup>27</sup> <http://www.unhcr.org/refugees/78/00/12/myanmar-issuues-peringatan-keras-pbb-htm> yang

mengadakan kunjungan Myanmar adalah mengadakan negosiasi pembebasan para tahanan politik dan menemui Aung San Suu Kyi.<sup>28</sup>

#### **E.4. Hubungan Myanmar dengan Amerika Serikat**

Amerika Serikat telah membekukan hubungan luar negerinya dengan Myanmar dalam kurun waktu lebih dari 20 tahun. Kini kedua belah pihak telah sepakat untuk memperbaiki hubungan antar negara tersebut. Hal tersebut dimulai dengan bertukar duta besar.<sup>29</sup> Pada 30 November 2011, Menlu AS mengadakan kunjungan untuk yang pertama kalinya ke negara bekas junta militer itu, yang berlangsung selama 3 hari. Menlu AS tersebut adalah Hillary Clinton. Kedatangan Clinton di Myanmar untuk bertemu dengan Thein Shein dan Aung San Suu Kyi, dalam waktu dan tempat yang tentunya tidak bersamaan. Pertemuan-pertemuan ini untuk membahas berbagai hal menyangkut hubungan kedua negara tersebut.<sup>30</sup>

Myanmar mendapatkan sanksi terberat saat terjadi kegentingan di Asia Tenggara pada tahun 1997. AS menambah lagi sanksi untuk Myanmar dengan memberlakukan larangan impor dari Myanmar ke AS, disamping pembekuan Aset dan keuangan Myanmar yang ada di semua lembaga perbankan AS. Hal

<sup>28</sup><http://www.suaramedia.com/berita-dunia/asia/8505-hubungan-gelap-myanmar-korea-utara-kejutkan-dunia.html>, yang diakses pada Desember 2011

<sup>29</sup><http://www.dw.de/as-berencana-pulihkan-hubungan-diplomatik-dengan-myanmar/a-15667515>, yang diakses pada Januari 2013

<sup>30</sup><http://www.tempo.co/read/news/2011/12/01/118369313/AS---Myanmar-Akhiri-Permusuhan>, yang diakses pada Januari 2013

tersebut masih ditambah lagi dengan pembekuan visa bagi para pejabat Myanmar.<sup>31</sup>

### **E.5. Hubungan Myanmar dengan Uni Eropa**

Hubungan antara ASEAN dan Uni Eropa sempat memanas sejak Myanmar bergabung dala ASEAN pada tahun 1997, dimana pada waktu itu tampuk kekuasaan Myanmar dipegang oleh junta militer. Eropa juga mengancam boikot pertemuan Uni Eropa-ASEAN saat Myanmar hendak menjadi ketua ASEAN pada 2006.<sup>32</sup>

Hubungan Myanmar dan Uni Eropa mengalami banyak peningkatan, terlebih setelah Uni eropa melakukan penangguhan sanksi terhadap Myanmar pada pertengahan tahun 2012 yang lalu. Pada April 2012, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Catherine Ashton mengadakan kunjungan ke Myanmar. Hal ini lah yang menjadi pertanda adanya hubungan Myanmar dan UE yang semakin membaik. Ashton akan membuka kantor perwakilan Uni Eropa di Rangoon, penangguhan sanksi atau pembatasan Uni Eropa terhadap Myanmar, dan dimulainya proses liberalisasi dengan pembukaan impor dari Uni Eropa ke Myanmar.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup><http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/12/11/18/mdokb9-kunjungan-obama-cabut-sanksi-myanmar>, yang diakses pada Januari 2013

<sup>32</sup><http://dunia.news.viva.co.id/news/read/307528-asean-sambut-baik-penangguhan-sanksi-myanmar>, yang diakses pada Januari 2013

<sup>33</sup><http://jaringnews.com/internasional/asia/14408/komit-bangun-myanmar-uni-eropa>, yang diakses pada Januari 2013

Perdana Menteri Inggris mengadakan lawatan ke Myanmar, dan Aung San Suu Kyi mengadakan kunjungan ke hampir sepuluh negara anggota Uni Eropa. Uni Eropa juga telah menghapuskan sebagian besar sanksi yang diberikannya terhadap Myanmar. Keputusan ini disahkan pada pertemuan para menteri luar negeri Eropa pada April 2012 yang lalu, dengan bertempat di Luxemburg.

## **F. PERKEMBANGAN DI MYANMAR**

Pada April 2010, Partai Nasional untuk Demokrat (NLD), yang merupakan partai pemimpin oposisi Myanmar, Aung San Suu Kyi akhirnya dibubarkan walaupun sangat ditentang oleh para anggota partai. Hal ini dilakukan berdasarkan undang-undang baru pemilihan umum--yang tentunya dibuat oleh pemerintah Junta Militer—bahwa partai harus mencopot anggota partai yang menjalani hukuman penjara bila ingin mendaftar dalam pemilu yang digelar akhir tahun lalu, tepatnya November 2010. Di sisi lain, bila partai menolak mencopot anggota yang dipenjara dan memilih tak mendaftar, maka organisasi politik itu harus dibubarkan.<sup>34</sup>

Pemerintah Myanmar untuk pertama kalinya dalam satu dekade, melaksanakan pemilu, tepatnya pada 7 November 2010. Pelaksanaan pemilu ini bisa

---

<sup>34</sup><http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/10/05/07/114734-uu-pemilu-junta-bekas-bubarkan-partai-aung-san-suu-kyi> yang diakses pada hari Rabu, 7 September



yang dipimpin oleh Thein Sein, presiden saat ini. Pemungutan suara November, dimenangkan oleh partai dukungan militer. Pemerintahan baru telah menunjukkan tanda-tanda untuk merangkul kubu oposisi, termasuk Suu Kyi dan Liga Nasional untuk Demokrasi, yang memenangkan pemilu 1990 namun tidak pernah diizinkan untuk memerintah. Rezim telah mengadopsi sikap yang lebih lunak terhadap lawan-lawannya, termasuk Suu Kyi, yang bertemu Thein Sein bulan lalu.<sup>37</sup>

Berbagai tindakan pengembangan ekonomi mulai dilaksanakan, reformasi telekomunikasi yang menguntungkan kehidupan rakyat diprioritaskan setelah pemerintah baru Myanmar didirikan pada Maret tahun 2011. Perusahaan telekomunikasi milik negara Myanmar menandatangani kontrak dengan 11 perusahaan swasta untuk menambah kapasitas. Dalam waktu lima tahun mendatang direncanakannya bertambah 30 juta ponsel GSM. Rencana Pengembangan Sektor ICT Myanmar yang baru dikeluarkan pun menunjukkan, antara tahun 2011-2015 handphone akan disebarluaskan ke pedesaan, diperkirakan ponsel akan terjangkau oleh hampir separoh dari 60 juta warga negara Myanmar. Sementara itu, pelarangan penggunaan ponsel terhadap orang asing dan wisatawan asing juga dicabut. Satu bulan dulu telah dibuka gerai ponsel khusus di Bandara Rangoon untuk melayani wisatawan. Harga sewa ponsel setiap hari hanya 2 hingga 4 dolar Amerika.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup><http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/11/09/29/l5a9dv-suu-kyi-myanmar-tak-butuh-revolusi-gaya-arab>, yang diakses pada hari Jum'at, 7 Oktober 2011

<sup>38</sup><http://indonesian.cri.cn/2011/10/03/15121798.htm>, yang diakses pada hari Jum'at, 7